

IMPLIKASI *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA UNIVERSITAS DI SURABAYA

Melvie Paramitha

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Widya Kartika Surabaya
E-mail: melvieparamitha24@gmail.com

ABSTRACT

Good corporate governance has long been proclaimed by the government and there are organizations that have become regulators. For good governance at universities or colleges, Minister of Education and Culture Muhammad Nuh started it in 2012. With the good university governance implemented in universities, it can have an impact on the performance of the relevant universities. This study aims to know the implications of good governance based on the principles of Law No. 12 of 2012 about Higher Education on the performance of universities in Surabaya. The research approach is quantitative research. The number of respondents in the study amounted to 70 people from 7 (seven) universities in Surabaya. Data collection method uses a questionnaire. Statistical testing includes testing validity and reliability and testing hypotheses. Hypothesis testing using multiple linear regression. The results of this study indicate that transparency and non-profit influence the performance of the university. While accountability, quality assurance, and efficiencies do not affect the performance of the university. The results of this study are expected to be a view for regulators in order to clarify mechanisms and measurements for good governance at universities or colleges.

Keywords: *good governance, performance, higher education, university, non-profit*

ABSTRAK

Good corporate governance telah lama dicanangkan oleh pemerintah dan telah ada organisasi yang menjadi pembuat regulasinya. Untuk *good governance* di universitas atau perguruan tinggi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh telah memulainya pada tahun 2012. Dengan adanya *good university governance* yang dilaksanakan di perguruan tinggi, dapat memberi dampak pada kinerja perguruan tinggi yang bersangkutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi *good governance* berdasarkan prinsip pada UU no.12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi terhadap kinerja universitas di Surabaya. Pendekatan penelitian adalah penelitian kuantitatif. Jumlah responden dalam penelitian berjumlah 70 orang yang berasal dari 7 (tujuh) universitas di Surabaya. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Pengujian statistik meliputi uji validitas dan reliabilitas serta pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis menggunakan multiple linear regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan nirlaba berpengaruh terhadap kinerja universitas. Sedangkan akuntabilitas, penjaminan mutu, dan efektivitas-efisiensi tidak memberi pengaruh terhadap kinerja universitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pandangan bagi pihak pembuat regulasi agar dapat memperjelas mekanisme dan pengukuran bagi *good governance* di universitas atau perguruan tinggi.

Kata kunci: *good governance, kinerja, pendidikan tinggi, universitas, nirlaba*

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah landasan untuk pengembangan dan pembangunan yang berguna di negara mana pun (Akomolafe dan Ibijola, 2014). Masyarakat diharapkan mampu mencapai jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Tingkat pendidikan tertinggi ditempuh di level perguruan tinggi. Dengan masyarakat yang berpendidikan baik, maka diharapkan dapat memberi kontribusi yang baik dan berguna bagi pembangunan negara.

Saint (2009) menyatakan bahwa pengelolaan universitas di Indonesia memiliki otonomi yang tinggi. Selain itu, UU no. 12 tahun 2012 pasal 63 menyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki otonomi masing-masing dalam pengelolaan universitasnya. Mereka berhak mengatur penggunaan dana yang diperoleh dan mencanangkan program kerja sesuai dengan visi dan misi universitas.

Meskipun perguruan tinggi memiliki otonomi masing-masing dalam pengelolaan institusinya, tetapi pengelolaan tersebut hendaknya tetap berdasar pada peraturan yang berlaku. Hal itu juga termasuk dalam penerapan prinsip *good governance* bagi perguruan tinggi. Prinsip tersebut adalah akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas-efisiensi. Dengan penerapan prinsip tersebut dalam perguruan tinggi, maka diharapkan mampu mendorong kinerja perguruan tinggi menjadi lebih baik.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan peneliti sebelumnya yaitu *case study* pada satu universitas. Penelitian sekarang menggunakan 7 (tujuh) universitas yang ada di Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good governance* (akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas-efisiensi) terhadap kinerja universitas di Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. *Research instrument* yang akan digunakan adalah kuesioner.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh dari akuntabilitas terhadap kinerja universitas di Surabaya?
2. Apakah terdapat pengaruh dari transparansi terhadap kinerja universitas di Surabaya?
3. Apakah terdapat pengaruh dari nirlaba terhadap kinerja universitas di Surabaya?

4. Apakah terdapat pengaruh dari penjaminan mutu terhadap kinerja universitas di Surabaya?
5. Apakah terdapat pengaruh dari efektivitas-efisiensi terhadap kinerja universitas di Surabaya?

LANDASAN TEORI

Stakeholder Theory

Stakeholder theory dapat didefinisikan sebagai beberapa kelompok atau individu yang dapat memberi dampak atau menerima dampak dari proses pencapaian tujuan organisasi (Abdullah dan Valentine, 2009). Menurut Freeman (1994), fokus *stakeholder theory* diartikan dalam dua hal inti. Pertama, apakah tujuan dari perusahaan. Hal ini mendorong manajer untuk mengartikulasikan rasa kebersamaan dari nilai atau *value* yang manajer buat, dan apa yang membawa para pemangku kepentingan dapat saling bersama-sama. Hal ini mendorong perusahaan dalam melihat masa depan dan memungkinkan untuk menghasilkan kinerja yang luar biasa, ditentukan baik dari segi tujuan dan metrik keuangan.

Kedua, apakah tanggung jawab yang manajemen harus berikan kepada para pemangku kepentingan? Hal ini mendorong manajer untuk mengartikulasikan bagaimana mereka ingin melakukan dan mengelola organisasi untuk menciptakan bisnis yang diinginkan manajer, terutama bagaimana jenis hubungan yang mereka inginkan dan butuhkan dengan para pemangku kepentingan mereka dalam rangka memenuhi tujuan para pemangku kepentingan.

Donaldson dan Preston (1995) menyatakan bahwa teori ini berfokus pada proses pembuatan keputusan manajerial dari kepentingan seluruh para pemangku kepentingan yang memiliki nilai intrinsik dan tidak ada di antara kepentingan mereka yang mendominasi.

Perguruan tinggi merupakan organisasi publik dan nirlaba. Banyak para pemangku kepentingan yang ada di sekitar perguruan tinggi yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda pada proses pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan perguruan tinggi. Para pemangku kepentingan tersebut antara lain mahasiswa, orang tua mahasiswa, karyawan, pemerintah, *user* (pengguna lulusan), alumni. Perguruan tinggi hendaknya tetap mempertimbangkan dan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan tersebut dalam melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan

pendidikan. Perguruan tinggi akan berusaha untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan para pemangku kepentingan tersebut dan sesuai dengan peraturan yang ada. Beberapa penelitian mengenai *university governance* dengan menggunakan dasar *stakeholder theory* telah dilakukan oleh para peneliti yaitu Brown (2001), Melo dkk (2008), Akomolafe dan Ibijola (2014), Nurhayati (2014), Dela Cruz dan Jimenez (2015), dan Maganga dan Vutete (2015).

Good Governance Perguruan Tinggi di Indonesia

Tata kelola yang baik juga diterapkan pada perguruan tinggi, tidak hanya pada perusahaan. Tata kelola universitas yang baik mencerminkan kesuksesan universitas dalam menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan siap bersaing dalam pada dunia global. Untuk itu, dibutuhkan kerja keras dan kedisiplinan tinggi dalam mendidik, serta mengajarkan nilai-nilai budaya dan pergaulan masyarakat global.

UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyatakan bahwa sebuah universitas telah memenuhi *good governance*. Pasal yang akan digunakan sebagai acuan yaitu pasal 63 yang menyatakan prinsip-prinsip dalam pengelolaan perguruan tinggi secara otonom. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Akuntabilitas

Pengertian akuntabilitas adalah komitmen perguruan tinggi untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pendidikan kepada *stakeholder*.

2. Prinsip Transparansi

Pengertian transparansi adalah keterbukaan dalam penyajian informasi yang relevan mengenai kegiatan dan proses penyelenggaraan pendidikan secara tepat waktu dan akurat kepada *stakeholder*.

3. Prinsip Nirlaba

Pengertian nirlaba adalah penyelenggaraan pendidikan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan sehingga dana yang diperoleh digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sarana prasarana sehingga dapat mendukung pembentukan lulusan yang berkualitas.

4. Prinsip Penjaminan Mutu

Pengertian penjaminan mutu adalah kegiatan, program kerja dan layanan perguruan tinggi dilaksanakan dengan memenuhi/melampaui standar nasional dan secara terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan.

5. Prinsip Efektivitas-Efisiensi

Pengertian efektivitas-efisiensi adalah kegiatan dan program kerja perguruan tinggi yang menggunakan berbagai sumber daya diupayakan agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan. Dana yang diperoleh perguruan tinggi dari berbagai sumber, hendaknya dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung proses pendidikan yang berkualitas.

Penelitian mengenai *good governance* perguruan tinggi di Indonesia belum ada yang menggunakan kelima prinsip berdasarkan UU no. 12 tahun 2012 sebagai pengukuran *good governance*. Hal ini yang mendorong peneliti untuk menggunakan pengukuran *good governance* sesuai kelima prinsip tersebut di dalam penelitian ini.

Kinerja Perguruan Tinggi

Organisasi publik adalah organisasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan organisasi publik diukur keberhasilannya melalui efektivitas dan efisiensi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun organisasi publik tidak bertujuan untuk mencari profit, organisasi ini terdiri dari unit-unit yang saling terkait yang mempunyai misi yang sama yaitu melayani masyarakat.

Pengukuran kinerja didefinisikan oleh Otley (1999) sebagai pengukuran keuangan atau non keuangan yang digunakan di berbagai tingkat dalam organisasi untuk mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan mereka, faktor kunci sukses, strategi dan perencanaan. Tujuan dari pengukuran kinerja adalah untuk memenuhi harapan para stakeholder melalui hasil kuantitatif yang terukur. Pada umumnya, pengukuran kinerja organisasi diukur dengan menggunakan indikator keuangan. Untuk melengkapi pengukuran kinerja keuangan, pengukuran non keuangan telah dikembangkan untuk menilai aspek non-kuantitatif dari kegiatan organisasi.

Penelitian mengenai kinerja perguruan tinggi telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian Philippe dkk (2010) menunjukkan hasil bahwa ketika universitas negeri menerima dana yang banyak, mereka menghasilkan lebih banyak paten jika

mereka lebih otonom dan memperoleh persaingan dari universitas swasta. Festo dan Nkote (2013) melakukan penelitian yang menunjukkan hasil bahwa variabel tata kelola organisasi memberi dampak negatif pada kinerja keuangan ketika kebijakan dan pembuatan keputusan merupakan prediktor yang signifikan dari kinerja keuangan. Penelitian Dela Cruz dan Jimenez (2015) menggunakan variabel dependen yaitu kinerja yang diukur menggunakan *quality and relevance, research capability and output, services to the community, dan management of resources*.

Dalam penelitian ini, pengukuran kinerja perguruan tinggi menggunakan perspektif *balanced scorecard* dengan indikator yang disampaikan oleh Lestari (2013). Perspektif tersebut telah disesuaikan dengan kondisi pada perguruan tinggi. Muncul perspektif *stakeholder* di dalam *scorecard* pengukuran kinerja perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *stakeholder theory*.

Hipotesis

Perguruan tinggi telah diberikan otonomi seluas-luasnya dalam proses penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi yang bersangkutan. Dalam mengelola perguruan tinggi, civitas akademika yang berada di dalam perguruan tinggi hendaknya memegang teguh *good governance* yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Dengan tata kelola yang baik dalam perguruan tinggi, diharapkan mampu mendukung pencapaian kinerja yang optimal bagi perguruan tinggi. Bagi perguruan tinggi yang merupakan organisasi non profit, maka kinerja non keuangan menjadi perhatian utama. Kinerja tersebut dapat diamati dari segi tridharma perguruan tinggi yang meliputi pengajaran, pengabdian kepada masyarakat, dan penelitian.

Nurhayati (2014) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji pengaruh otonomi dan akuntabilitas terhadap kinerja manajerial. Kinerja manajerial menggunakan pengukuran perspektif *balanced scorecard*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Secara simultan terdapat pengaruh signifikan otonomi dan akuntabilitas terhadap kinerja manajerial (2) Secara parsial hanya akuntabilitas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial sedangkan otonomi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja manajerial.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang disusun adalah:

H₁: Terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja universitas

H₂: Terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja universitas

H₃: Terdapat pengaruh nirlaba terhadap kinerja universitas

H₄: Terdapat pengaruh penjaminan mutu terhadap kinerja universitas

H₅: Terdapat pengaruh efektivitas-efisiensi terhadap kinerja universitas

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner atau survei. Responden dalam penelitian ini adalah dekan, kepala program studi, dan dosen.

Research instrument yang digunakan adalah kuesioner. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 70 eksemplar ke tujuh (7) universitas yang ada di Surabaya. Penyebaran kuesioner dilakukan pada bulan April 2018. Sampai dengan bulan Juli 2018, kuesioner yang dikembalikan sebanyak 70 eksemplar (100%).

Variabel dependen (Y) dalam penelitian ini adalah kinerja universitas yang diukur dengan menggunakan perspektif *balanced scorecard*. Variabel independen (X) dalam penelitian ini adalah penerapan *good governance* yang dilihat dari sisi akuntabilitas (X₁), transparansi (X₂), nirlaba (X₃), penjaminan mutu (X₄), efektivitas-efisiensi (X₅). Uji statistik yang digunakan adalah *multiple linear regression*.

Metode Analisis Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner dan kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Arikunto, 2010:221). Uji validitas dilakukan dengan melihat nilai KMO (*Kaiser-Meyer-Oilkon*) *Measure Sampling of Adequacy*.

Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah alat untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk dimana dikatakan reliabel atau handal jika jawaban–jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Arikunto, 2010:221). Uji ini dilakukan dengan mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan menggunakan SPSS dengan uji statistik *Cronbach Alpha* dengan dinyatakan *reliable* ketika nilai *Cronbach Alpha* > dengan signifikansi 5%.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah analisis yang digunakan untuk jumlah variabel bebas dua atau lebih variabel bebas. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

a = konstanta

b_1, b_2, b_3, b_4, b_5 = koefisien regresi variabel bebas

Y = kinerja universitas

X_1 = akuntabilitas

X_2 = tranparansi

X_3 = nirlaba

X_4 = penjaminan mutu

X_5 = efektivitas-efisiensi

e = standar error

Uji Determinasi (R^2 Square/ R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran kesesuaian atau ketepatan garis regresi terhadap data, atau menunjukkan proporsi variasi total variabel-variabel terikat yang dijelaskan oleh variabel bebasnya secara bersama-sama. Nilai (R^2) yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Uji Parsial (t)

Uji statistik t (*t test*) digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi parsial berbeda secara signifikan dari nol atau apakah suatu variabel bebas secara individu berpengaruh terhadap variabel terikatnya. Uji t dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi yang diperoleh dengan $\alpha = 0,05$. Jika hasil pengujian hipotesis menunjukkan tingkat signifikansi $> 0,05$, maka hipotesis tersebut tidak didukung. Jika hasil pengujian hipotesis menunjukkan tingkat signifikansi $\leq 0,05$, maka hipotesis tersebut didukung.

PEMBAHASAN

Pengujian Validitas dan Reliabilitas

1. Variabel Akuntabilitas (X_1)

Dari hasil uji validitas yang terlihat pada variabel Akuntabilitas (X_1), menunjukkan bahwa KMO pada variabel Akuntabilitas (X_1) sebesar 0,538. Hal ini menunjukkan bahwa KMO telah melampaui standart 0,5 ($0,538 > 0,5$) sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut.

2. Variabel Transparansi (X_2)

Dari hasil uji validitas yang terlihat pada variabel Transparansi (X_2), menunjukkan bahwa KMO pada variabel Transparansi (X_2) sebesar 0,675. Hal ini menunjukkan bahwa KMO telah melampaui standart 0,5 ($0,675 > 0,5$) sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut.

3. Variabel Nirlaba (X_3)

Dari hasil uji validitas yang terlihat pada variabel Nirlaba (X_3), menunjukkan bahwa KMO pada variabel Nirlaba (X_3) sebesar 0,729. Hal ini menunjukkan bahwa KMO telah melampaui standart 0,5 ($0,729 > 0,5$) sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut.

4. Variabel Penjaminan Mutu (X_4)

Dari hasil uji validitas yang terlihat pada variabel Penjaminan Mutu (X_4), menunjukkan bahwa KMO pada variabel Penjaminan Mutu (X_4) sebesar 0,552. Hal ini menunjukkan bahwa KMO telah melampaui standart 0,5 ($0,552 > 0,5$) sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut.

5. Variabel Efektivitas-efisiensi (X_5)

Dari hasil uji validitas yang terlihat pada variabel Efektivitas-efisiensi (X_5), menunjukkan bahwa KMO pada variabel Efektivitas-efisiensi (X_5) sebesar 0,701. Hal ini menunjukkan bahwa KMO telah melampaui standart 0,5 ($0,701 > 0,5$) sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut.

6. Variabel Kinerja (Y)

Dari hasil uji validitas yang terlihat pada variabel Kinerja (Y), menunjukkan bahwa KMO pada variabel Kinerja (Y) sebesar 0,695. Hal ini menunjukkan bahwa KMO telah melampaui standart 0,5 ($0,695 > 0,5$) sehingga layak untuk dianalisis lebih lanjut.

Uji Reliabilitas

1. Variabel Akuntabilitas (X_1)

Variabel ini memiliki 8 (delapan) item pernyataan. Menurut hasil uji reabilitas 8 item pernyataan pada variabel akuntabilitas memiliki *Cronbch's Alpha* $0,620 > 0,60$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan yang disusun reliabel.

2. Variabel Transparansi (X_2)

Variabel ini memiliki 10 (sepuluh) item pernyataan. Menurut hasil uji reabilitas 10 item pernyataan pada variabel transparansi memiliki *Cronbch's Alpha* $0,778 > 0,60$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan yang disusun reliabel.

3. Variabel Nirlaba (X_3)

Variabel ini memiliki 8 (delapan) item pernyataan. Menurut hasil uji reabilitas 8 item pernyataan pada variabel nirlaba memiliki *Cronbch's Alpha* $0,800 > 0,60$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan yang disusun reliabel.

4. Variabel Penjaminan Mutu (X_4)

Variabel ini memiliki 6 (enam) item pernyataan. Menurut hasil uji reabilitas 6 item pernyataan pada variabel penjaminan mutu memiliki *Cronbch's Alpha* $0,629 > 0,60$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan yang disusun reliabel.

5. Variabel Efektivitas-Efisiensi (X_5)

Variabel ini memiliki 6 (enam) item pernyataan. Menurut hasil uji reabilitas 6 item pernyataan pada variabel efektivitas-efisiensi memiliki *Cronbch's Alpha* $0,710 > 0,60$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan yang disusun reliabel.

6. Variabel Kinerja (Y)

Variabel ini memiliki 22 item pernyataan. Menurut hasil uji reabilitas 22 item pernyataan pada variabel kinerja memiliki *Cronbch's Alpha* $0,878 > 0,60$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pernyataan yang disusun reliabel.

Pengujian Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis menggunakan uji statistik regresi linear berganda dengan $\alpha=5\%$. Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Keterangan	Koefisien Beta	Signifikansi
Konstanta	1.235	
Akuntabilitas (X_1)	-.057	.637
Transparansi (X_2)	.221	.050
Nirlaba (X_3)	.258	.002
Mutu (X_4)	.087	.292

Efektivitas (X ₅)	.131	.178
-------------------------------	------	------

Sumber: output SPSS, disusun peneliti

Dari tabel tersebut, dapat disusun persamaan regresinya yaitu sebagai berikut:

$$Y = 1,235 - 0,057X_1 + 0,221X_2 + 0,258X_3 + 0,087X_4 + 0,131X_5 + e$$

Dalam penelitian ini, besarnya *R Square* (R^2) adalah 39,6%. Hal itu menunjukkan bahwa variabel independen *good governance* yang terdiri dari akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas-efisiensi hanya mampu menjelaskan variabel dependen kinerja universitas sebesar 39,6%. 60,4% yang lain dijelaskan oleh variabel independen diluar variabel *good governance*. Hasil pengujian koefisien determinasi (*R Square*) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R Square	Adjusted R Square	Durbin-Watson
1	0,396	0,349	1,770

Sumber: output SPSS, disusun peneliti

Dari hasil pengujian hipotesis (tabel 1) terlihat bahwa nilai signifikansi akuntabilitas sebesar $0,637 > 0,05$ (α) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh akuntabilitas terhadap kinerja universitas. Dengan demikian, H_1 tidak didukung dalam penelitian ini.

Dari hasil pengujian hipotesis (tabel 1) terlihat bahwa nilai signifikansi transparansi sebesar $0,050 \leq 0,05$ (α) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh transparansi terhadap kinerja universitas. Dengan demikian, H_2 didukung dalam penelitian ini.

Dari hasil pengujian hipotesis (tabel 1) terlihat bahwa nilai signifikansi nirlaba sebesar $0,002 \leq 0,05$ (α) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh nirlaba terhadap kinerja universitas. Dengan demikian, H_3 didukung dalam penelitian ini.

Dari hasil pengujian hipotesis (tabel 1) terlihat bahwa nilai signifikansi penjaminan mutu sebesar $0,292 > 0,05$ (α) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh penjaminan mutu terhadap kinerja universitas. Dengan demikian, H_4 tidak didukung dalam penelitian ini.

Dari hasil pengujian hipotesis (tabel 1) terlihat bahwa nilai signifikansi efektivitas-efisiensi sebesar $0,178 > 0,05$ (α) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat

pengaruh efektivitas-efisiensi terhadap kinerja universitas. Dengan demikian, H₅ tidak didukung dalam penelitian ini.

Diskusi Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good governance* terhadap kinerja universitas di Surabaya. *Good governance* terdiri dari variabel akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas-efisiensi. Variabel ini berdasarkan prinsip *good governance* yang terdapat pada UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel transparansi memberi pengaruh terhadap kinerja universitas. Hal ini menunjukkan bahwa civitas akademika mempertimbangkan keterbukaan dalam penyajian informasi yang relevan mengenai kegiatan dan proses penyelenggaraan pendidikan secara tepat waktu dan akurat kepada *stakeholder*. Dengan adanya keterbukaan dalam penyajian informasi mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh universitas kepada para *stakeholder*, maka *stakeholder* dapat mengetahui dengan baik dan pasti kondisi yang ada di universitas tersebut. Transparansi dapat mendukung kinerja universitas menjadi lebih baik. Hal ini didorong dengan pandangan bahwa kegiatan yang diselenggarakan oleh universitas telah disampaikan dengan terbuka dan transparan kepada para *stakeholder*.

Selain transparansi, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel nirlaba memberi pengaruh terhadap kinerja universitas. Hal ini menunjukkan bahwa civitas akademika mempertimbangkan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh universitas tidak bertujuan untuk mencari keuntungan semata sehingga dana yang diperoleh digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sarana prasarana sehingga dapat mendukung pembentukan lulusan yang berkualitas. Prinsip nirlaba dapat mendukung kinerja universitas menjadi lebih baik. Hal ini didorong dengan pandangan bahwa civitas akademika bekerja dengan sebaik-baiknya tanpa mempertimbangkan keuntungan pribadi maupun organisasi semata. Hal ini juga sesuai dengan posisi universitas sebagai organisasi nirlaba yaitu organisasi yang tujuan utama operasional bukan untuk mencari laba semata. Kegiatan universitas diselenggarakan untuk kepentingan para *stakeholder*.

Berdasarkan tabel 1, variabel akuntabilitas, penjaminan mutu, dan efektivitas-efisiensi tidak memberi pengaruh pada kinerja universitas. Penjelasan mengenai hasil tersebut diuraikan dalam bahasan berikut ini.

Pengertian akuntabilitas adalah komitmen universitas untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang dilakukan dalam proses penyelenggaraan pendidikan kepada *stakeholder*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak memberi pengaruh terhadap kinerja universitas. Kegiatan yang ada di universitas harus dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Meskipun pertanggungjawaban telah dilakukan, belum tentu mendorong kinerja universitas menjadi lebih baik. Begitu pula sebaliknya, pertanggungjawaban tidak dilaksanakan dengan baik, terdapat kemungkinan kinerja universitas tetap baik. Dengan demikian, akuntabilitas tidak memberi pengaruh terhadap kinerja universitas.

Penjaminan mutu memiliki pengertian yaitu kegiatan, program kerja dan layanan perguruan tinggi dilaksanakan dengan memenuhi standar nasional dan secara terus menerus berupaya meningkatkan mutu pelayanan pendidikan. Hasil pengujian hipotesis (tabel 1) menunjukkan bahwa penjaminan mutu tidak memberi pengaruh terhadap kinerja universitas. Meskipun penjaminan mutu belum berjalan dengan baik, tetapi para civitas akademika tetap bekerja untuk mencapai kinerja yang baik. Begitupun sebaliknya, penjaminan mutu berjalan dengan baik, tetapi kinerja universitas belum tentu baik. Dengan demikian, penjaminan mutu tidak memberi pengaruh terhadap kinerja universitas.

Pengertian efektivitas-efisiensi adalah kegiatan dan program kerja perguruan tinggi yang menggunakan berbagai sumber daya diupayakan agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas-efisiensi tidak memberi pengaruh terhadap kinerja universitas. Meskipun kadang kala personel kurang mampu bekerja dengan efektif dan terjadi pemborosan, para civitas akademika tetap bekerja dengan baik untuk mencapai kinerja universitas yang baik. Begitupun sebaliknya. Hal ini yang menyebabkan variabel efektivitas-efisiensi tidak memberi pengaruh terhadap kinerja universitas.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *good governance* (akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, dan efektivitas-efisiensi)

terhadap kinerja universitas. Hasil menunjukkan bahwa transparansi dan nirlaba memberi pengaruh terhadap kinerja universitas. Sedangkan akuntabilitas, penjaminan mutu, dan efektivitas-efisiensi tidak memberi pengaruh pada kinerja universitas. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah hendaknya pimpinan universitas memperhatikan faktor transparansi dan nirlaba untuk lebih meningkatkan kinerja universitas.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pandangan bagi pembuat kebijakan atau regulasi untuk lebih menjelaskan mekanisme dan pengukuran *good corporate governance* bagi perguruan tinggi yang berbeda dengan sebuah *corporate*. Bagi para peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan pandangan mengenai pengukuran *good governance* bagi perguruan tinggi dengan berdasar pada UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian awal dari penggunaan variabel *good governance* berdasarkan UU no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan demikian, penggunaan indikator kuesioner perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan. Kedua, penelitian ini hanya menggunakan tujuh (7) universitas di Surabaya, sehingga bagi penelitian selanjutnya dapat memperluas obyek penelitian yang digunakan yang kemungkinan menunjukkan hasil berbeda dengan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H., & Valentine, B. (2009). Fundamental and ethics theories of corporate governance. *Middle Eastern Finance and Economics*, 4(4), 88-96.
- Akomolafe, C., & Ibijola, E. (2014). Staff and Students' Perception of Students' Participation in University Governance in Ekiti and Ondo States, Nigeria. *International Journal of Learning and Development*, 4(2), Pages 73-81.
- Arikunto, Suharsimi (2010), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Brown, W. O. (2001). Faculty participation in university governance and the effects on university performance. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 44(2), 129-143.
- Dela Cruz, M. M., & Jimenez, J. M. (2015). Toward a Participatory University Governance: Model for State Universities and Colleges in the Philippines. *Asian Journal of Educational Research*, 3(1), 26-42.
- Donaldson, T., & Preston, L. E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: Concepts, evidence, and implications. *Academy of management Review*, 20(1), 65-91.

- Festo, T. N., & Nkote, I. N. (2013). Corporate Governance in Private Universities: Financial Performance Perspective. *Journal of Business Law and Ethics*, 1(1), 1-15.
- Freeman, R. E. (1994). The politics of stakeholder theory: Some future directions. *Business ethics quarterly*, 4(04), 409-421.
- Lestari, A. S. (2013). Analisis Penilaian Kinerja Lembaga Pendidikan Tinggi Dengan Metode Balanced Scorecard: Penerapannya Dalam sistem Manajemen Strategis (Studi Kasus Pada Universitas Brawijaya Malang), *2nd International Seminar on Quality and Affordable Education*, 441-450.
- Maganga, E., & Vutete, C. (2015). Corporate Governance Performance of Zimbabwean State Universities as a Basis of Quality Higher Education: The Student and Lecturer Perspective. *IOSR Journal of Business and Management* 17(6), 109-116.
- Melo, A. I., Sarrico, C. S., & Radnor, Z. (2008). Research design for analysing the relationship between governance structures and performance management systems in universities. *Reflecting Education*, 4(2), 68-81.
- Nurhayati, I. (2014). Pengaruh Otonomi dan Akuntabilitas Perguruan Tinggi terhadap Kinerja Manajerial. *Jurnal Trikonomika*, 13(1), 1-12.
- Otley, D. (1999). Performance management: a framework for management control systems research. *Management accounting research*, 10(4), 363-382.
- Philippe, A., Mathias, D., Hoxby Caroline, M., & Mas-Colell, S. A. (2010). The Governance and Performance of Research Universities: Evidence from Europe and the US. *Economic Policy*, 61(1), 7-56.
- Saint, W. (2009). Guiding Universities: Governance and Management Arrangements around the Globe, *Human Development Network World Bank*.
- Undang-Undang no. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.